IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. R. (2018). Analisis implementasi transaksi non tunai (*non cash*) dalam mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. 1-59. http://eprint.stieww.ac.id/493/

Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi transaksi non tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). 1-14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/52624/31148

Detikfinance. (2015, Februari 04). *Biaya cetaknya Rp3,5 triliun setahun, BI: Uang tolong dirawat*. Detikfinance. https://finance.detik.com/moneter/d-2823602/biaya-cetaknya-rp-35-triliun-setahun-bi-uang-tolong-dirawat

Diniari, E. B. (2020, November 04). Belajar mengolah dan menganalisis data kualitatif. https://www.ruangguru.com/blog/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif

DJPK. (tanpa tahun). *Modul peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dona, H. R., & Khaidir, A. (2018). Implementasi pengelolaan keuangan dengan transaksi non tunai di Seketariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1),* 56-70. http://repository.unp.ac.id/26481/1/33%205-Article%20Text-8-1-10-20190320.pdf

Evita. (2020, Juli 08). Penelitian deskriptif – pengertian, kriteria, contoh. https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/penelitian-deskriptif/

Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi, 12(2),* 227–236. https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150

Ismail, I. (2021, Februari 16). *Pengertian alat pembayaran dan jenis-jenisnya*. https://accurate.id/aplikasi-kasir/alat-pembayaran/

Kurnia, L. D. (2020). Analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen, 14(1),* 44-57. https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/download/439/327

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Manaf, A. (2016). *Good governance dan pelayanan publik* (Cetakan 1). Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.

Maulina, V. (2018). Analisis implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang). 1-24. *Tesis*. https://journal.ugm.ac.id/abis/article/download/58899/28598

Mongisidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. Ch. (2019). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19 (9)*, 1-16. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/23435

Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4)*, 220–229. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2018). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2019). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2020). *Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Kabupaten Tuban. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2020 tentang pajak daerah*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SE Nomor 910/1867/SJ implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota*. Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SE Nomor 910/1866/SJ implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi*. Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Perbendaharaan, D. S., & Perbendaharaan, D. J. (2018). *Panduan teknis bendahara pengeluaran*. Kementerian Keuangan RI.

Rahmah, N. (tanpa tahun). *Mengenal kontrak payung: Syarat, tujuan, dan kelebihannya*. https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/07/kontrak-payung.html

Rezkia, S. M. (2020, September 11). Langkah-langkah menggunakan teknik analisis data kualitatif. https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Reduksi%20data%20merupakan%20tahap%20dari,dan%20memudahkan%20dalam%20penarikan%20kesimpulan

Sedarmayanti. (2007). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.

Sendari, A. A. (2021, Februari 09). Implementasi adalah pelaksanaan tujuan, pahami pengertian dan contohnya. Liputan 6. https://m.liputan6.com/hot/read/4478774/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Septiani, S. (2018). Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* (Studi kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1)*, 1171–1181. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1478/1238

Subarsono, A. (2009). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

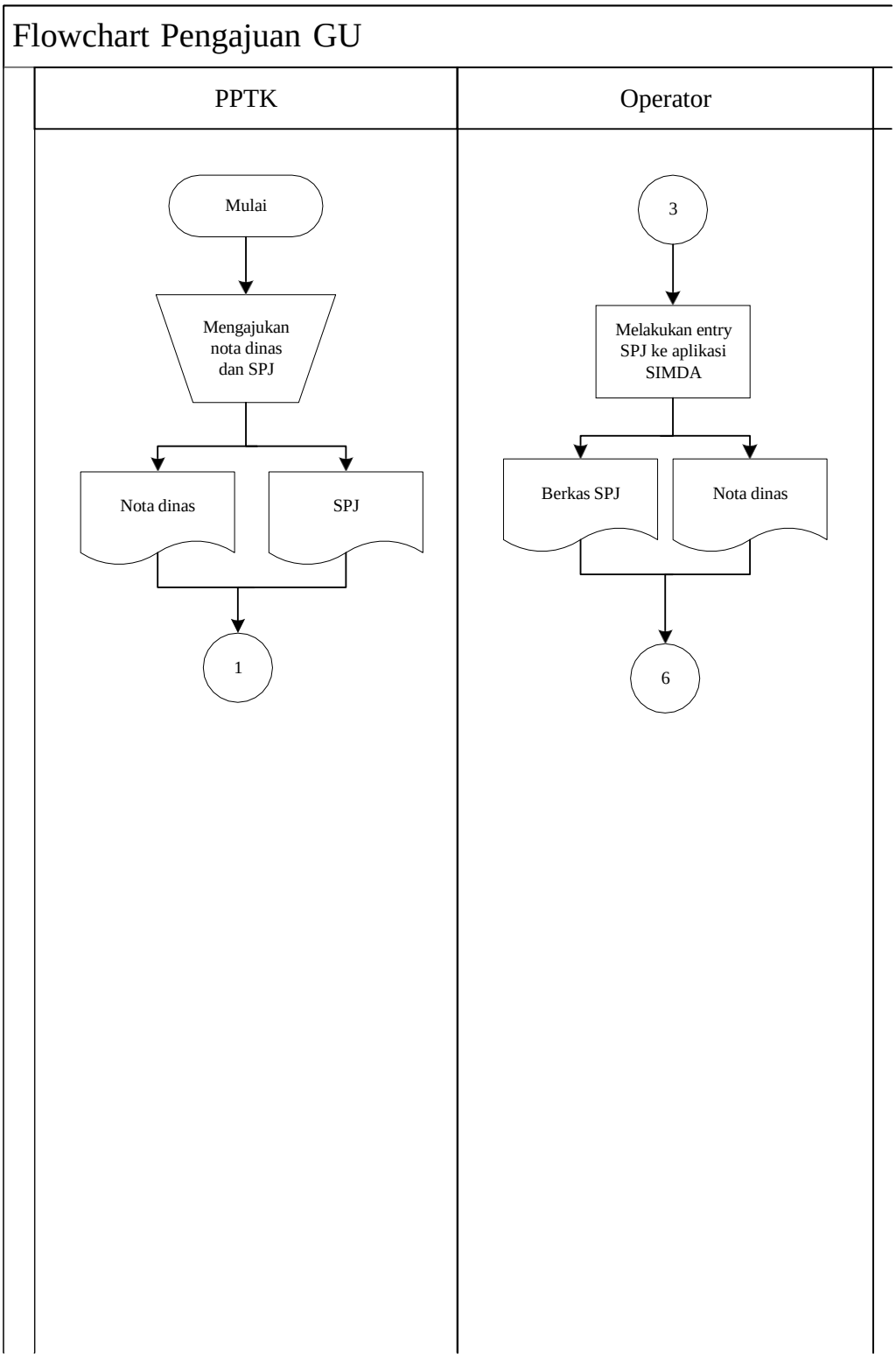
Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Widiyaningrum, R., & Rosmiati, M. (2020). Penerapan transaksi non tunai atas pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan prinsip *good governance* (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*. 1041-1047. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/2161

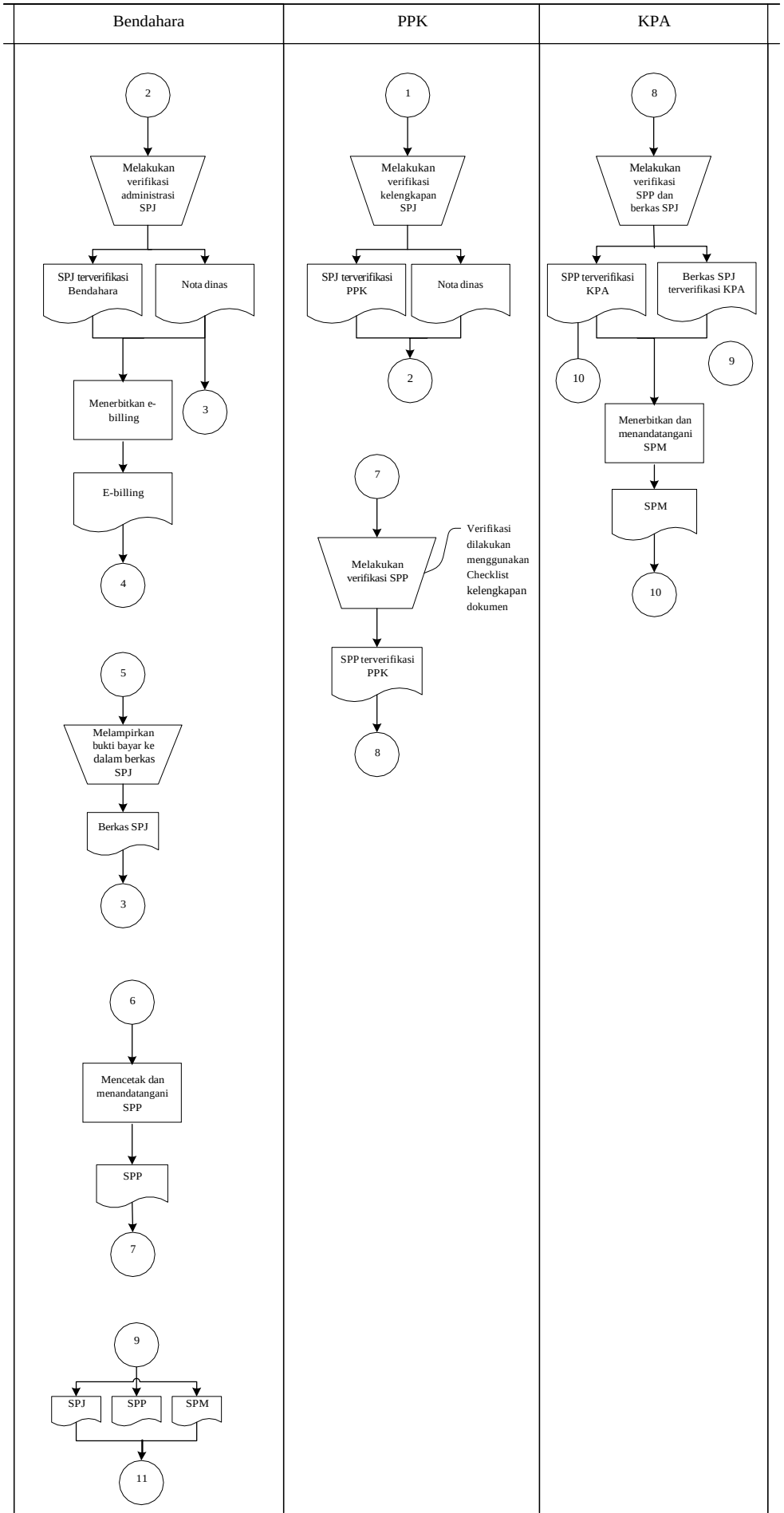
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN

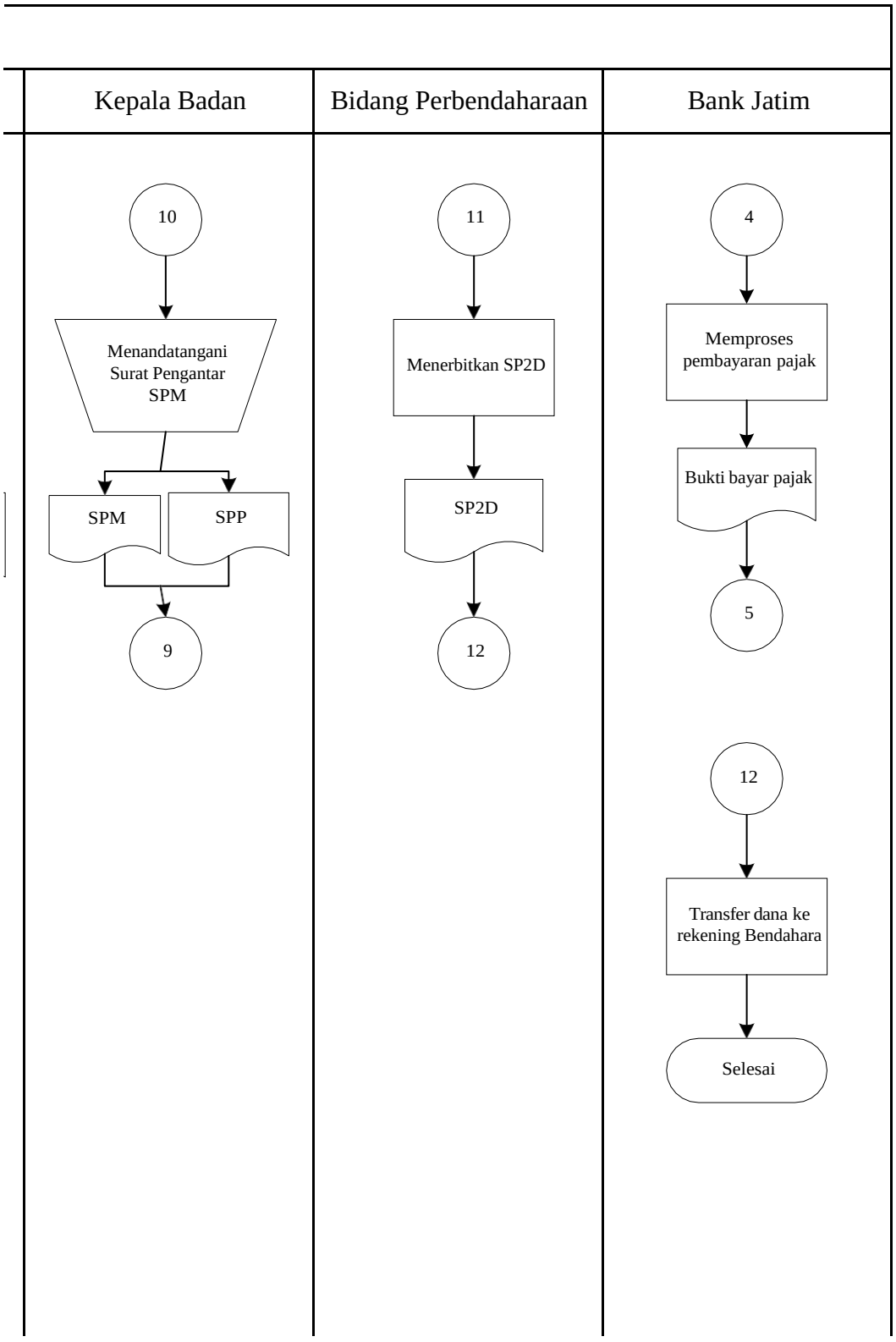
Lampiran 1. *Flowchart* Pengajuan GU



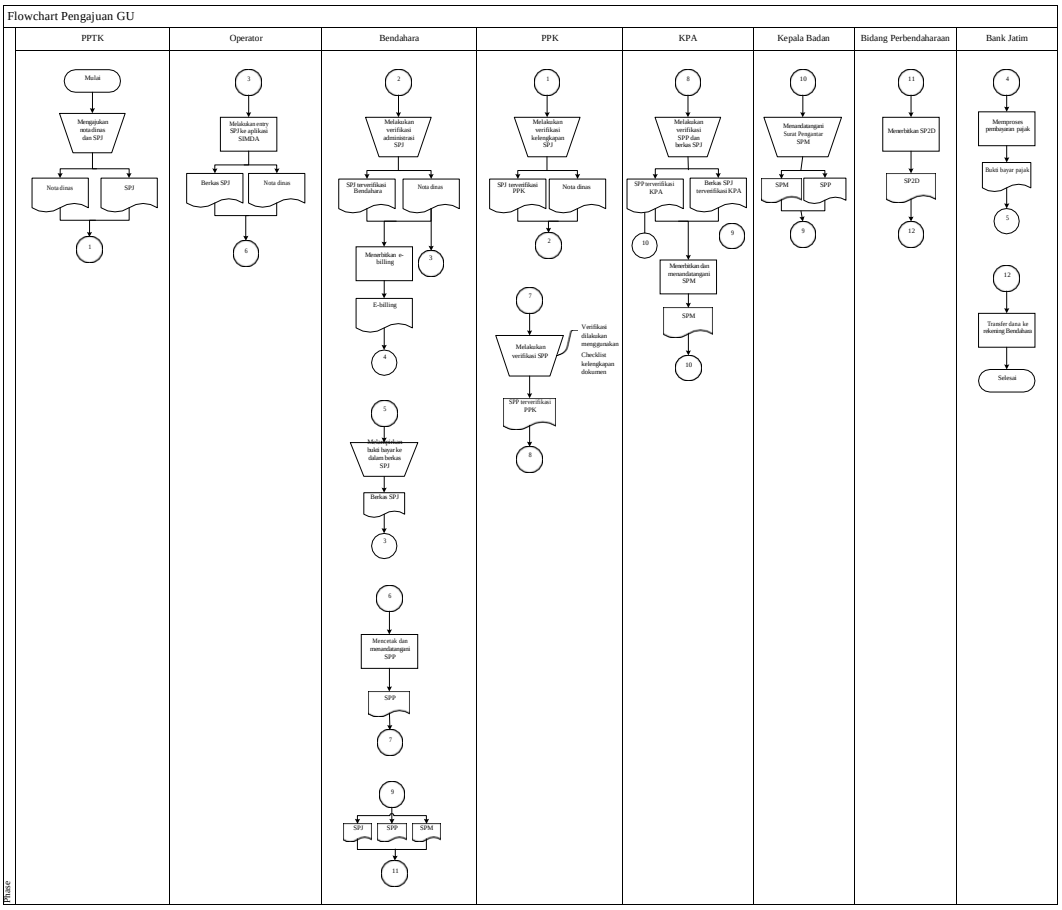
UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



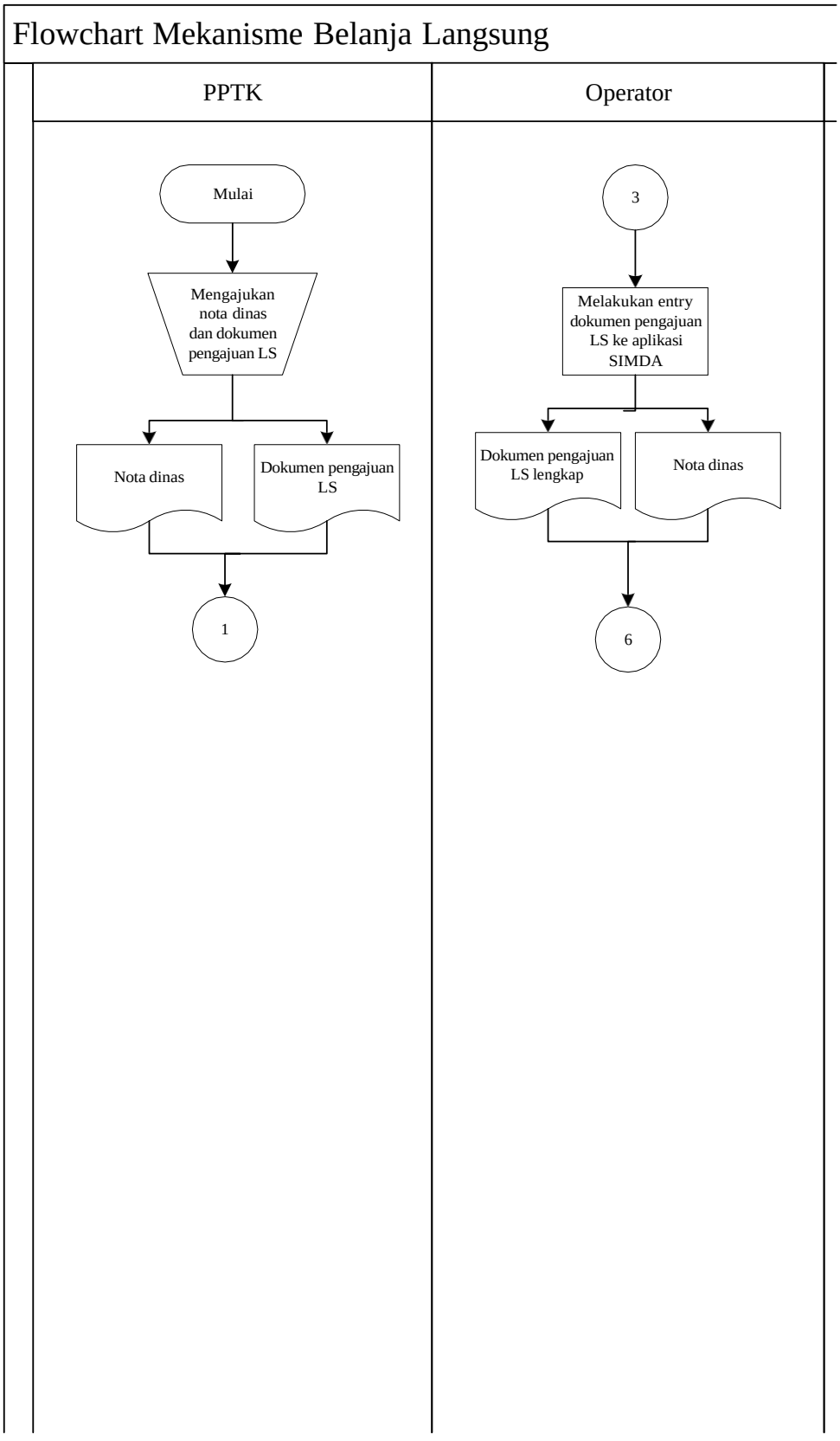
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



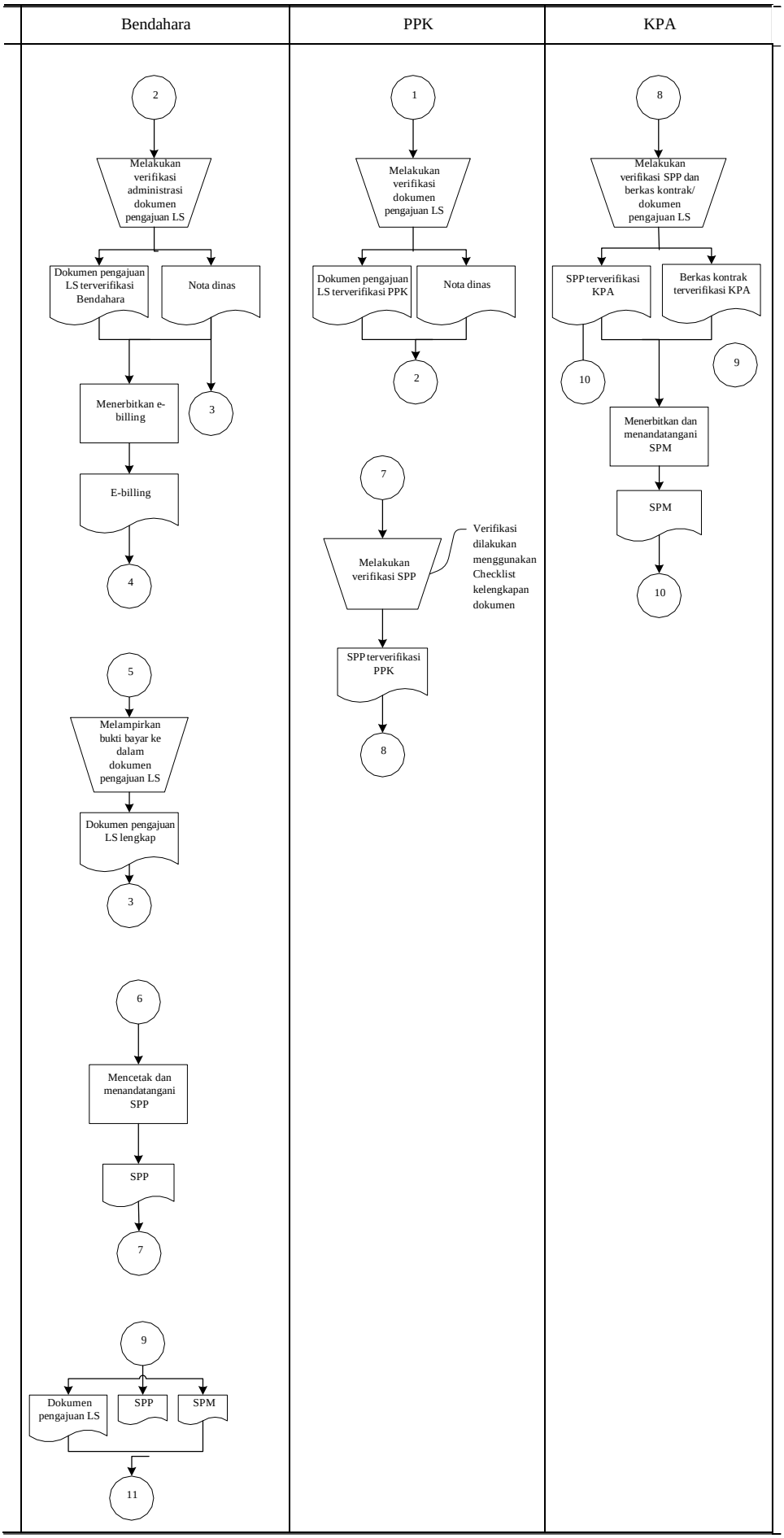
Sumber: data diolah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

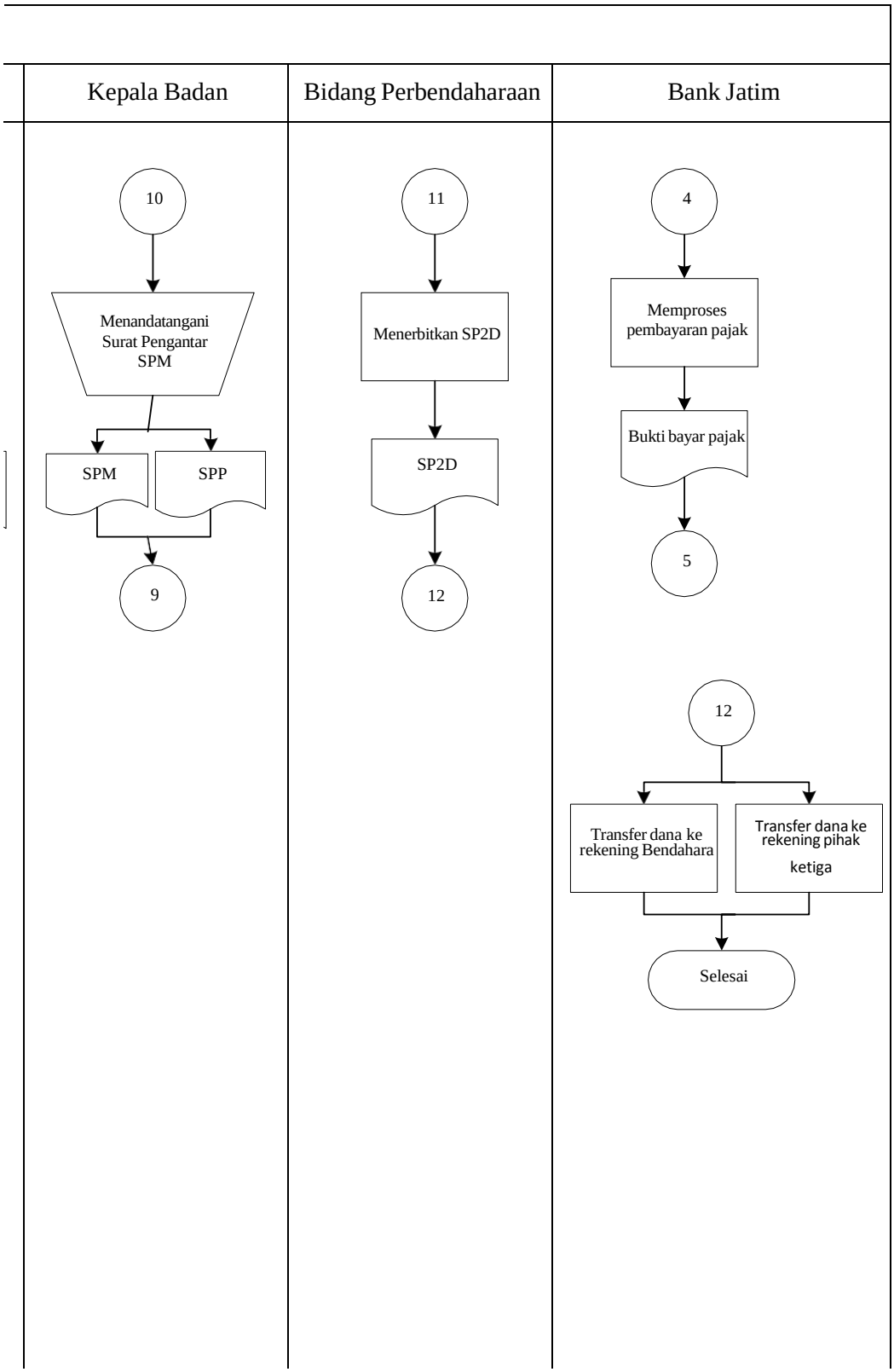
Lampiran 2. *Flowchart* Mekanisme Belanja Langsung



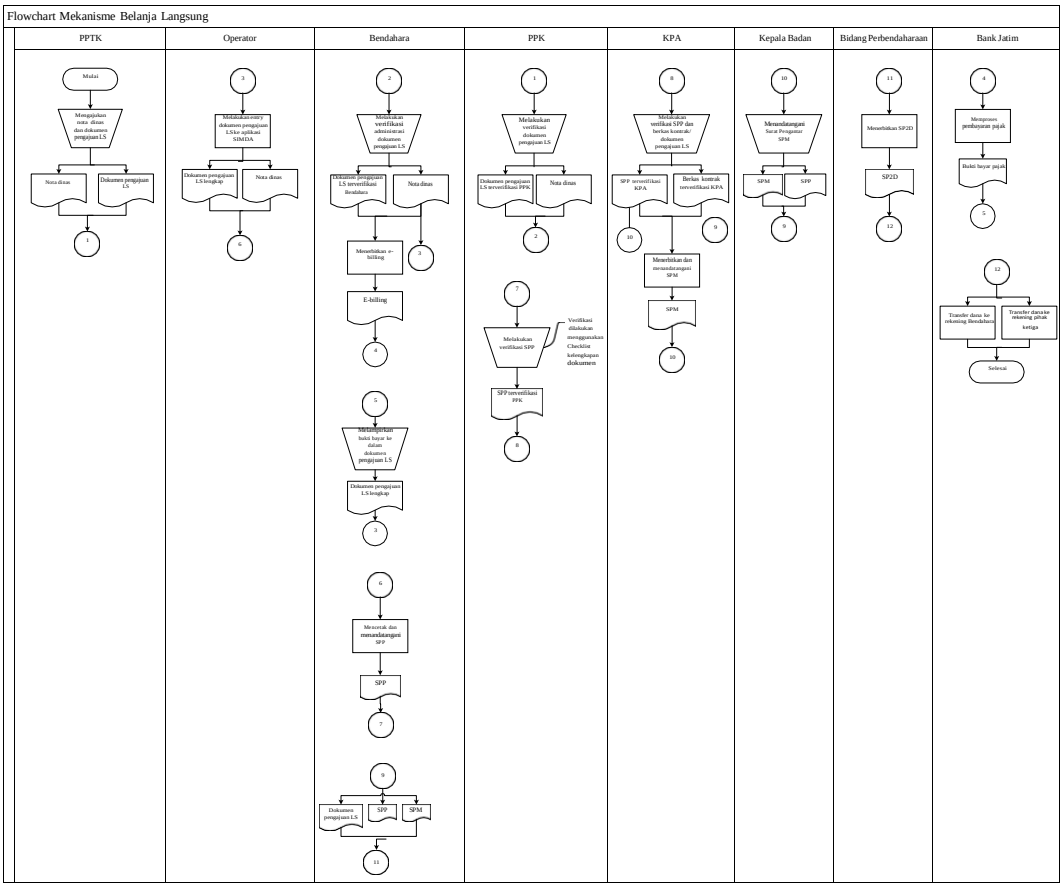
UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



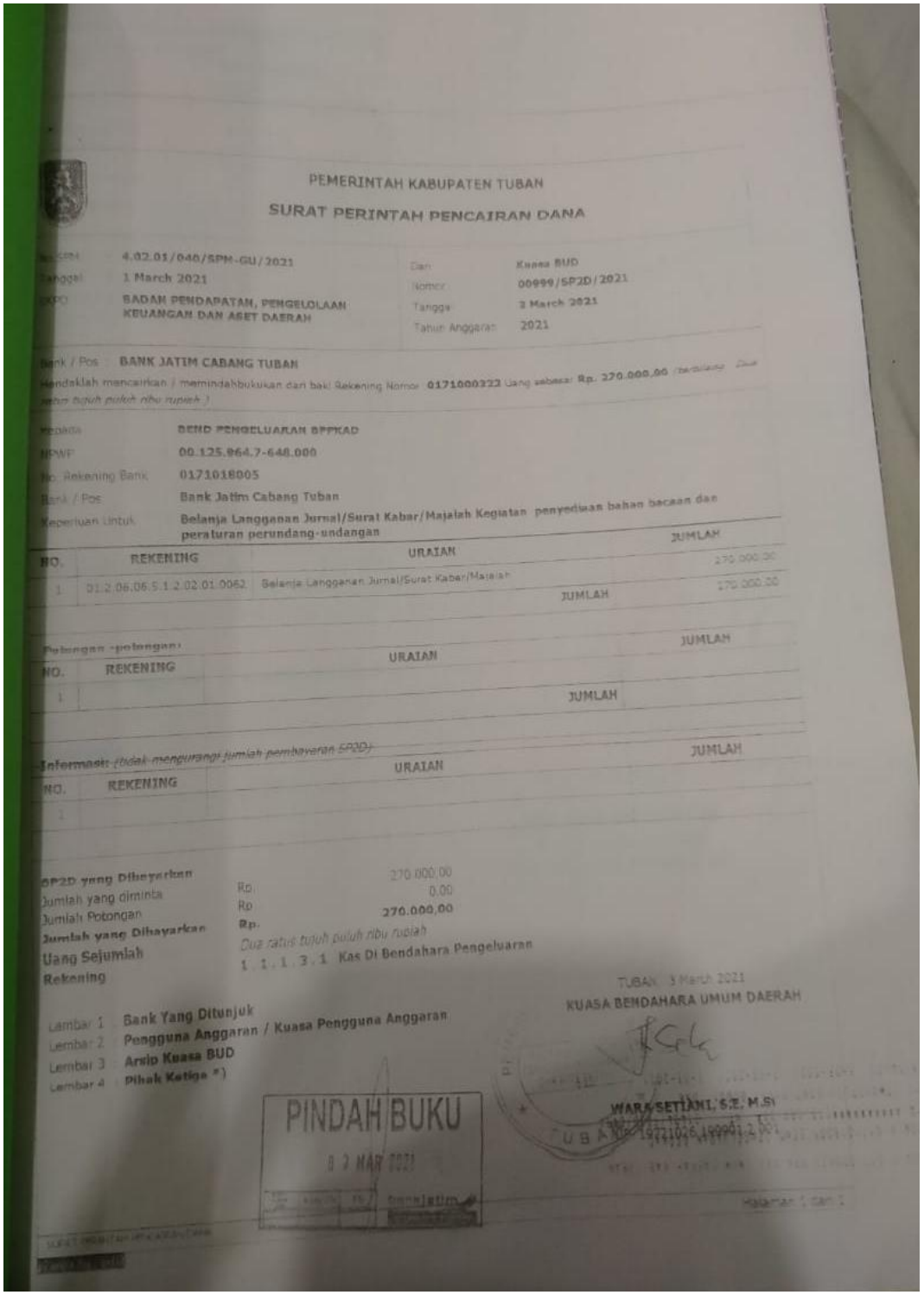
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Sumber: data diolah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 3. Contoh SP2D



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM : 4.02.01/046/SPM-GU/2021
Tanggal : 1 March 2021
SKPD : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dari : Kuasa BUD
Nomor : 00999/SP2D/2021
Tanggal : 3 March 2021
Tahun Anggaran : 2021

Bank / Pos : BANK JATIM CABANG TUBAN
Mendaklah mencairkan / memindahbukukan dan beli Rekening Nomor 0171000323 Uang sebesar Rp. 270.000,00 (terbilang: Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kepada : BEND PENGELUARAN BPPKAD
NPWP : 00.125.964.7-648.000
No. Rekening Bank : 0171018005
Bank / Pos : Bank Jatim Cabang Tuban
Keperluan Untuk : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	01.2.06.06.5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.000,00
		JUMLAH	270.000,00

Potongan-potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
		JUMLAH	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D):

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan : Rp. 270.000,00
Jumlah yang diminta : Rp. 0,00
Jumlah Potongan : Rp. 270.000,00
Jumlah yang Dibayarkan : Rp.
Uang Sejumlah : *Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*
Rekening : 1.1.1.3.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

TUBAN, 3 March 2021
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WARA SETIANI, S.E, M.Si
NIP. 19711026 199001 2 001

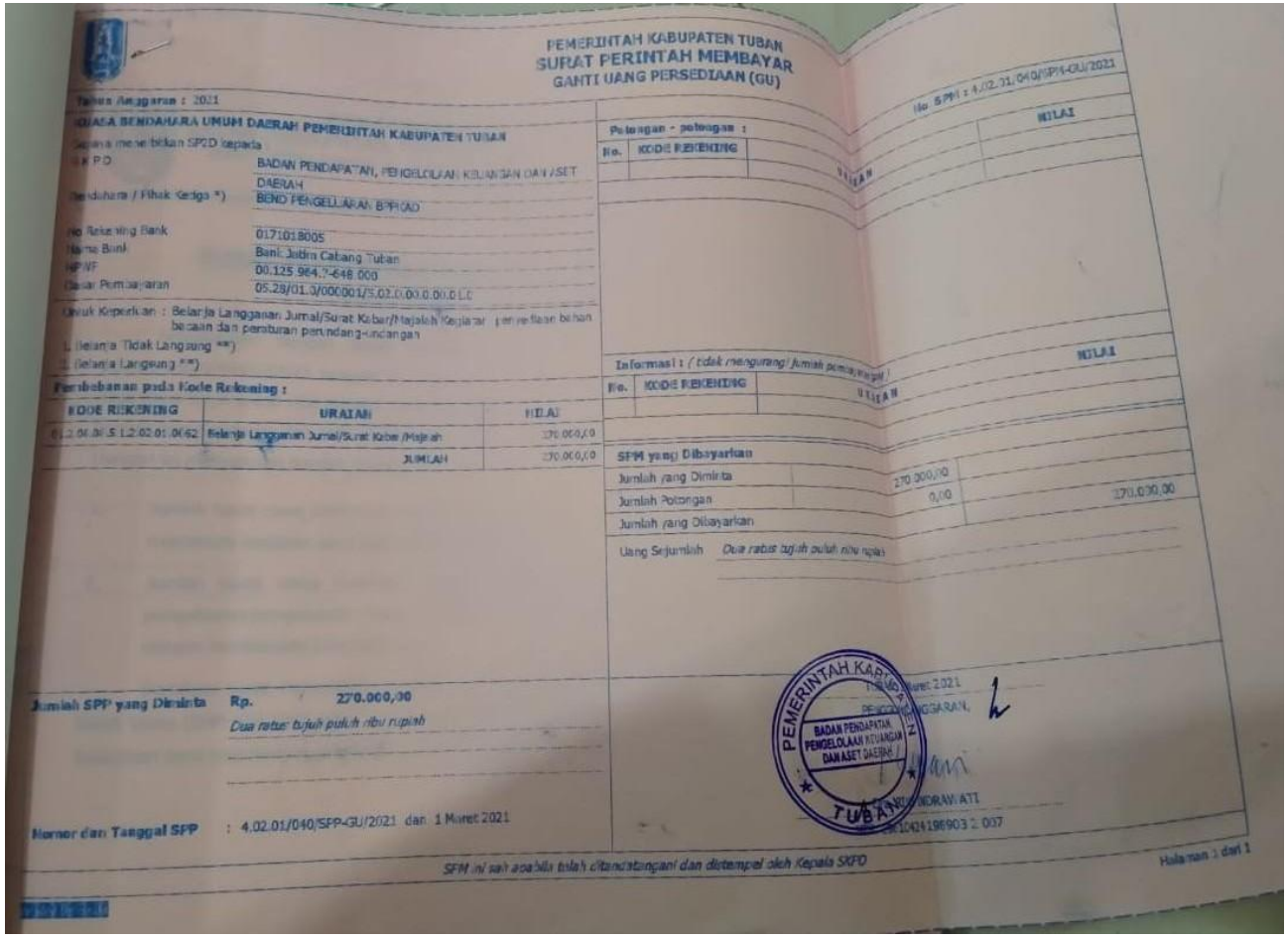
PINDAH BUKU
0 3 MAR 2021

Sumber: BPPKAD Tuban

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 4. Contoh SPM

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Tahun Anggaran : 2021

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Agar membayar kepada

SKPD	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Bendahara / Pihak Ketiga *)	BEND PENGELUARAN BPPKAD
No Rekening Bank	0171018005
Nama Bank	Bank Jatim Cabang Tuban
NPWP	00.125 984.7-648.000
Dasar Pembayaran	05.28/01.3/000001/5.02.0.00.0.00.0.00

Untuk Keperluan : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Kejaksaan Pemerintah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. (Belanja Tidak Langsung **)
2. (Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
0.1.2.04.01.S.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.000,00
	JUMLAH	270.000,00

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 270.000,00
Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 4.02.01/040/SPP-GU/2021 dan 1 Maret 2021

Potongan - potongan :

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

Informasi : *(tidak mengurangi jumlah pembayaran)*

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	270.000,00	
Jumlah Potongan	0,00	270.000,00
Jumlah yang Dibayarkan		

Uang Sejumlah *Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*

Tuban, 1 Maret 2021
PENGGUNA ANGGARAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19641024 198903 2 007

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

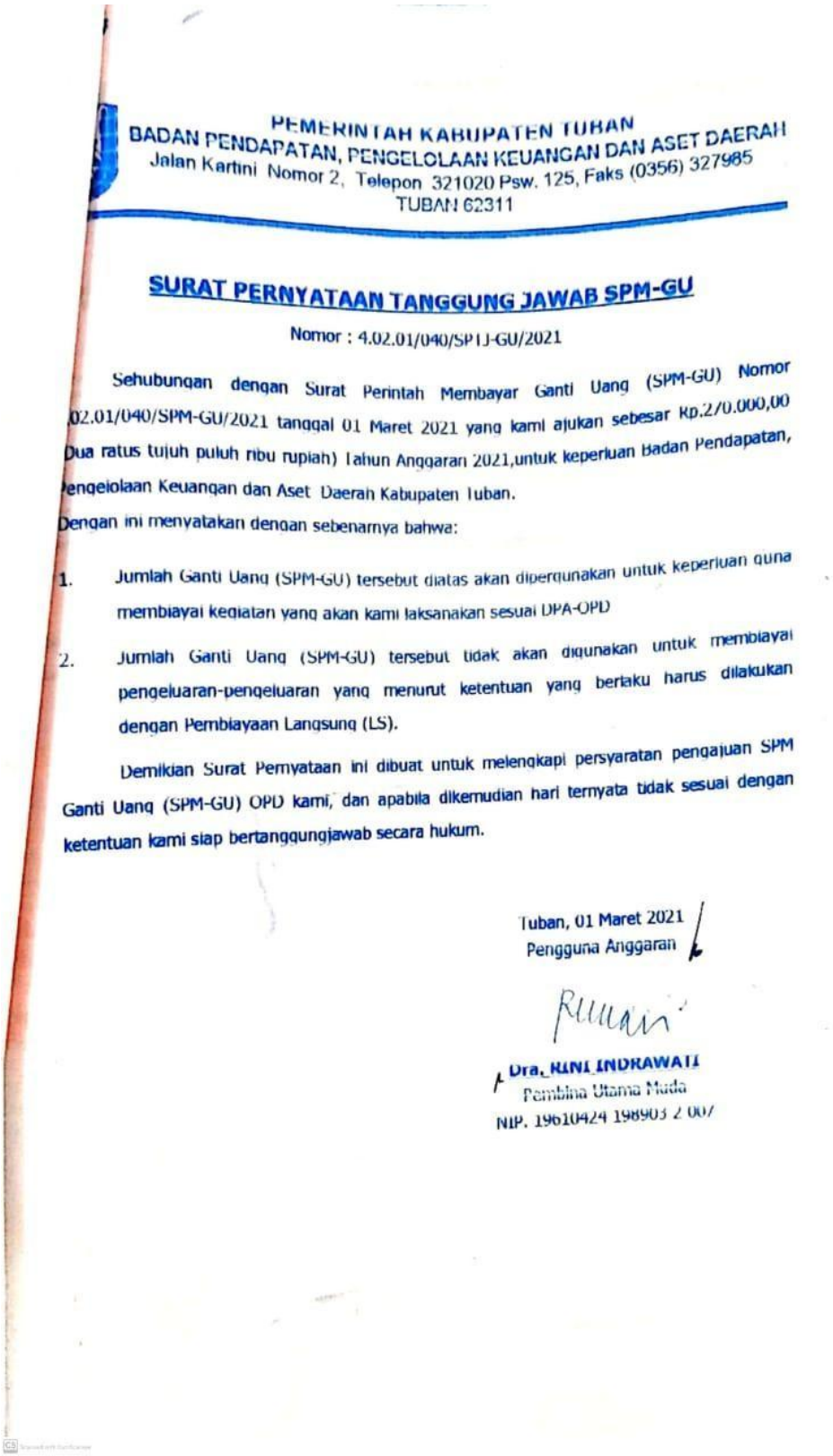
Halaman 1 dari 1

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sumber: data diolah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kartini Nomor 2, Telepon 321020 Psw. 125, Faks (0356) 327985
TUBAN 62311

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SPM-GU

Nomor : 4.02.01/040/SPTJ-GU/2021

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor 02.01/040/SPM-GU/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang kami ajukan sebesar Rp.270.000,00 Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2021,untuk keperluan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Ganti Uang (SPM-GU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD
2. Jumlah Ganti Uang (SPM-GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembiayaan Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM Ganti Uang (SPM-GU) OPD kami, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan ketentuan kami siap bertanggungjawab secara hukum.

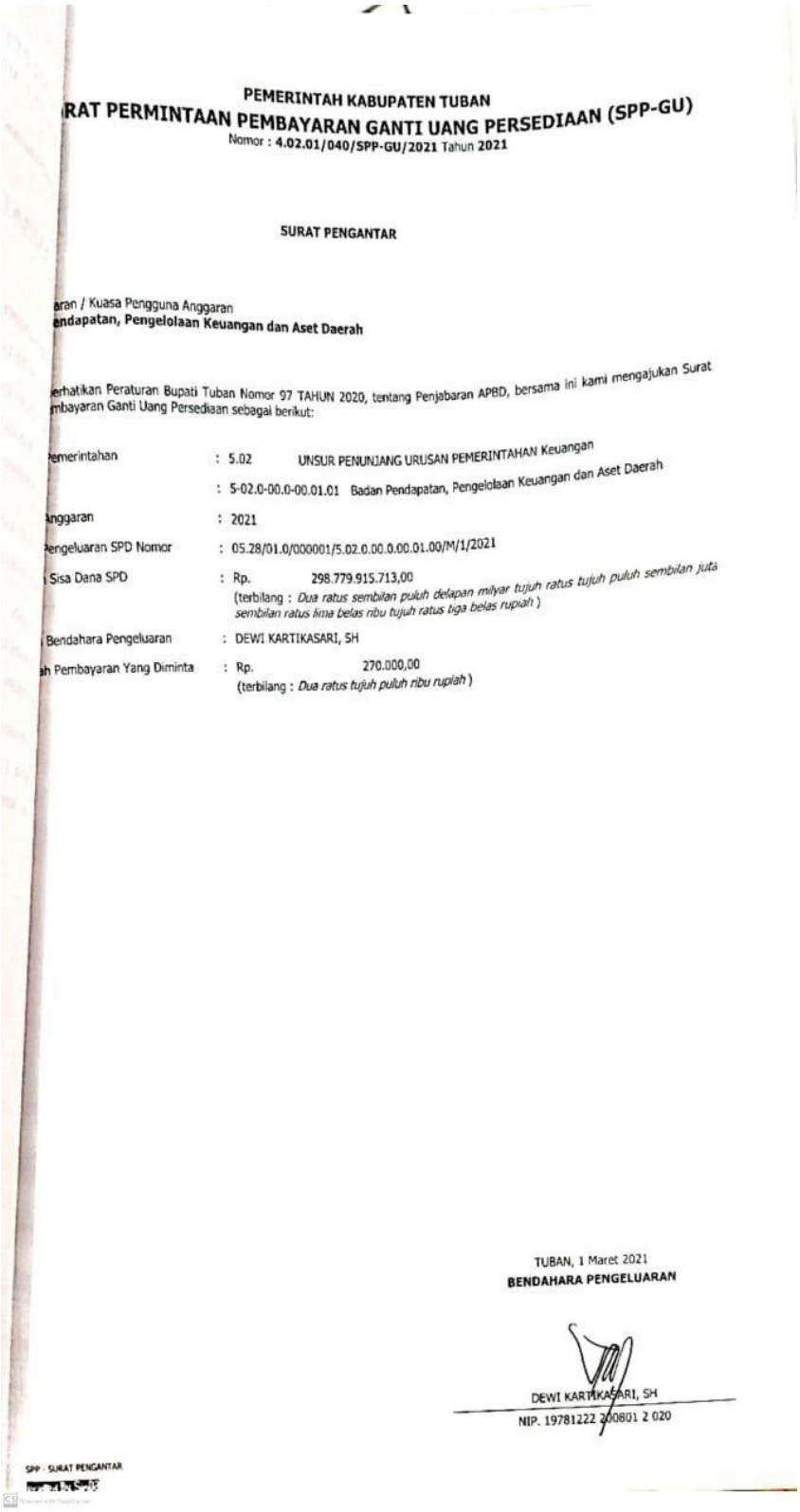
Tuban, 01 Maret 2021
Pengguna Anggaran

Dra. RINI INDRAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610424 198903 2 007

Sumber: BPPKAD Tuban

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 6. Contoh Surat Pengantar SPP



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

RAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : **4.02.01/040/SPP-GU/2021** Tahun **2021**

SURAT PENGANTAR

aran / Kuasa Pengguna Anggaran
ndapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

erhatikan Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 TAHUN 2020, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat mbayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut:

emerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan
: 5-02.0-00.0-00.01.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

nggaran : 2021

engeluaran SPD Nomor : 05.28/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.01.00/M/1/2021

Sisa Dana SPD : Rp. 298.779.915.713,00
(terbilang : *Dua ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*)

Bendahara Pengeluaran : DEWI KARTIKASARI, SH

h Pembayaran Yang Diminta : Rp. 270.000,00
(terbilang : *Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

TUBAN, 1 Maret 2021
BENDAHARA PENGELUARAN

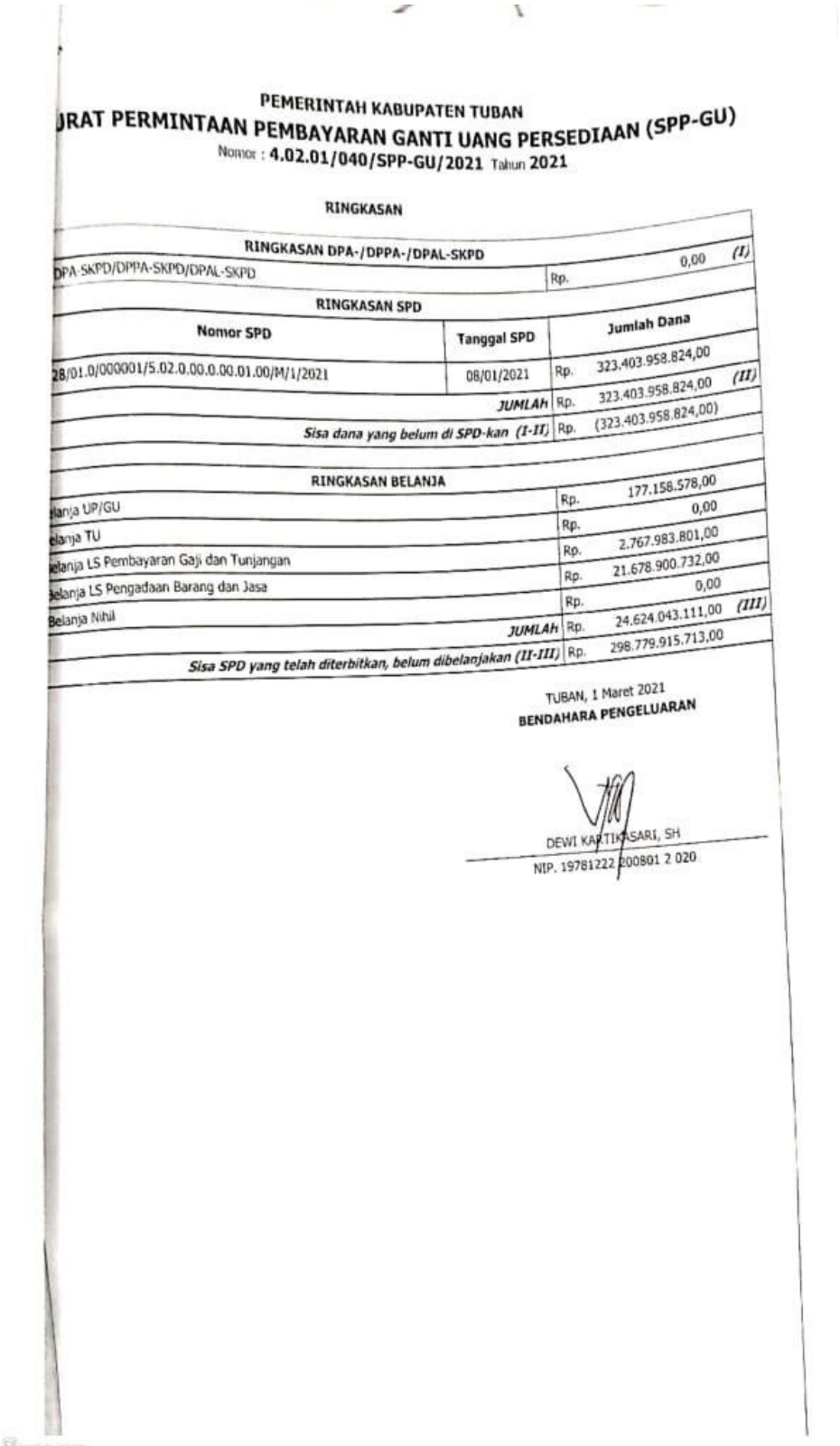
DEWI KARTIKASARI, SH
NIP. 19781222 200801 2 020

SPP - SURAT PENGANTAR

Sumber: BPPKAD Tuban

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 7. Contoh Ringkasan SPP



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

URAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : **4.02.01/040/SPP-GU/2021** Tahun **2021**

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	Rp.	0,00	*(I)*

RINGKASAN SPD			
Nomor SPD	**Tanggal SPD**	**Jumlah Dana**	
28/01.0/000001/5.02.0.00.0.00.01.00/M/1/2021	08/01/2021	Rp. 323.403.958.824,00	
JUMLAH		Rp. 323.403.958.824,00	*(II)*
Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)		Rp. (323.403.958.824,00)	

RINGKASAN BELANJA			
lanja UP/GU	Rp.	177.158.578,00	
elanja TU	Rp.	0,00	
elanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.767.983.801,00	
elanja LS Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	21.678.900.732,00	
Belanja Nihil	Rp.	0,00	
JUMLAH	Rp.	24.624.043.111,00	*(III)*
Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp.	298.779.915.713,00	

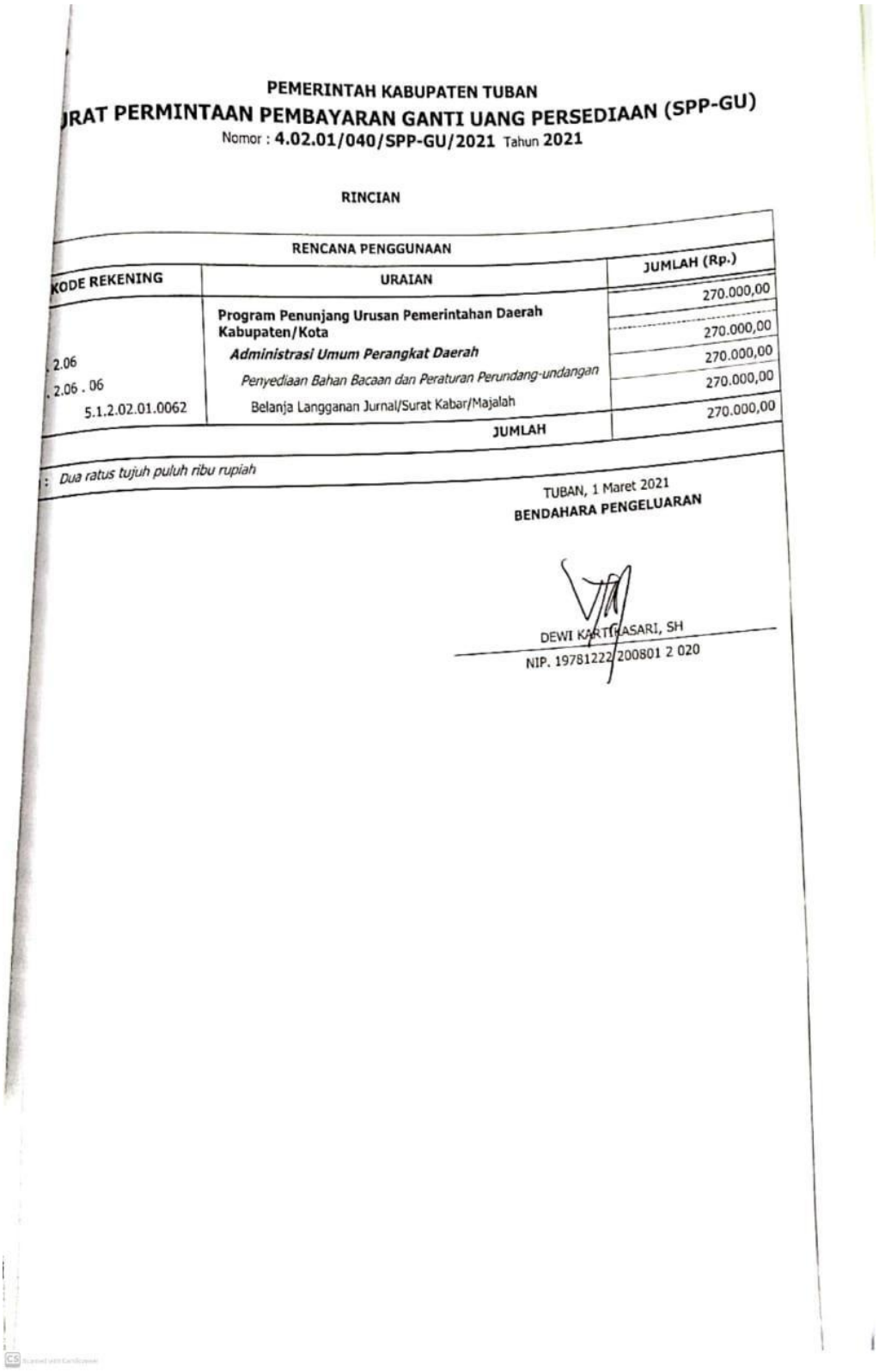
TUBAN, 1 Maret 2021
BENDAHARA PENGELUARAN

DEWI KARTIKASARI, SH
NIP. 19781222 200801 2 020

Sumber: BPPKAD Tuban

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 8. Contoh Rincian SPP



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

JRAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor : **4.02.01/040/SPP-GU/2021** Tahun **2021**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN		
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH (Rp.)**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.000,00
. 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	270.000,00
. 2.06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	270.000,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	270.000,00
	JUMLAH	270.000,00

: *Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*

TUBAN, 1 Maret 2021
BENDAHARA PENGELUARAN

DEWI KARTIKASARI, SH
NIP. 19781222 200801 2 020

Sumber: BPPKAD Tuban

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

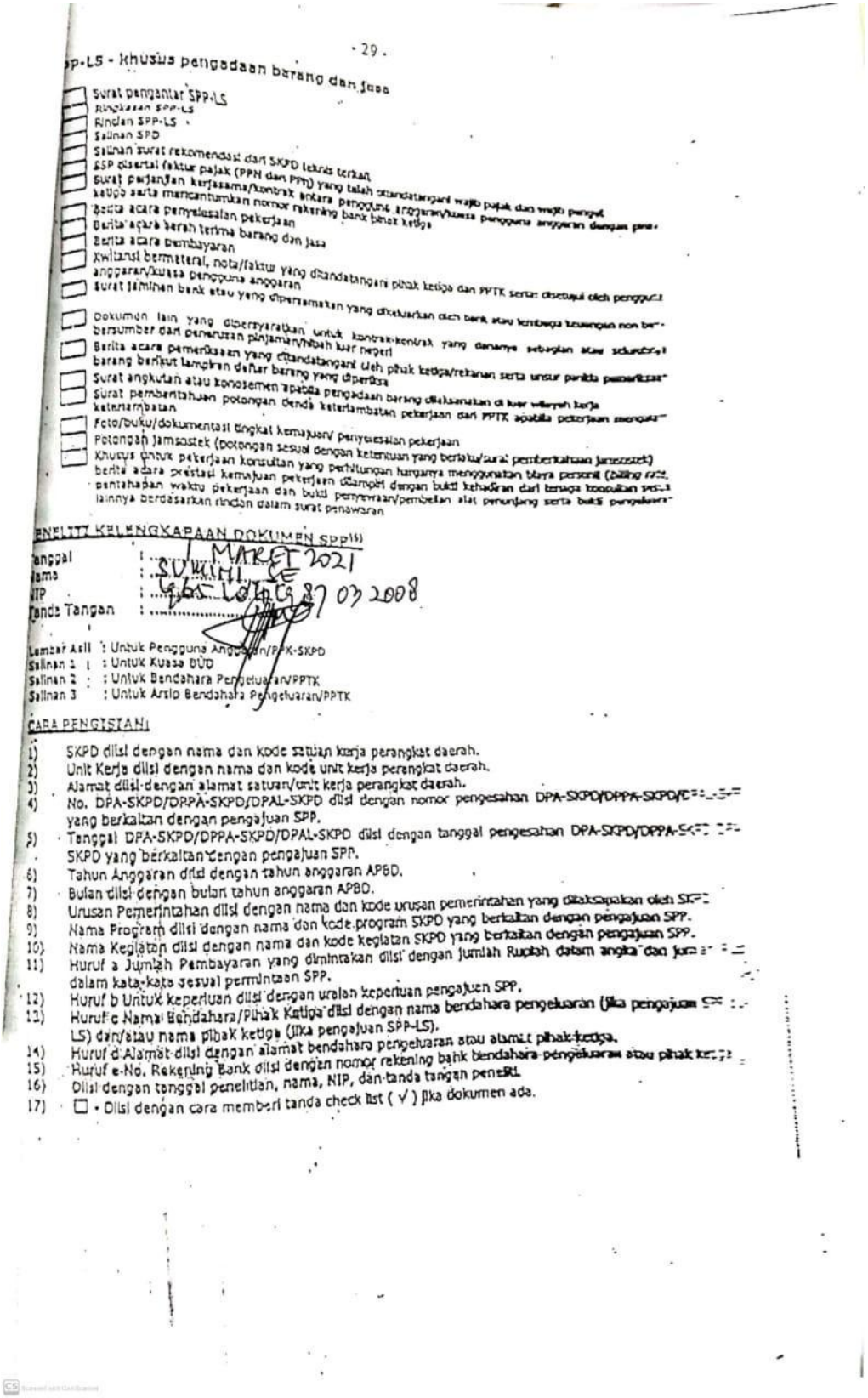
Lampiran 9. *Checklist*

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Coret yang tidak perlu

1. SPP-UP
   - ☐ Surat pengantar SPP-UP
   - ☐ Ringkasan SPP-UP
   - ☐ Rincian SPP-UP
   - ☐ Salinan SPD
   - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
   - ☐ Lampiran lainnya
2. SPP-GU
   - ☑ Surat pengantar SPP-GU
   - ☑ Ringkasan SPP-GU
   - ☑ Rincian SPP-GU
   - ☑ Salinan SPD
   - ☑ Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya
   - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
   - ☑ Lampiran lainnya
3. SPP-TU
   - ☐ Surat pengantar SPP-TU
   - ☐ Ringkasan SPP-TU
   - ☐ Rincian SPP-TU
   - ☐ Salinan SPD
   - ☐ Surat pengesahan SPJ
   - ☐ Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD
   - ☐ Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian kembali uang persediaan
   - ☐ Lampiran lainnya
4. SPP LS - khusus pembayaran gaji dan tunjangan
   - ☐ Surat pengantar SPP-LS
   - ☐ Ringkasan SPP-LS
   - ☐ Rincian SPP-LS
   - ☐ Pembayaran gaji induk
   - ☐ Gaji susulan
   - ☐ Kekurangan gaji
   - ☐ Gaji terusan
   - ☐ Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas
   - ☐ SK CPNS
   - ☐ SK PNS
   - ☐ SK kenaikan pangkat
   - ☐ SK jabatan
   - ☐ Kenaikan gaji berkala
   - ☐ Surat pernyataan pelantikan
   - ☐ Surat pernyataan masih menduduki jabatan
   - ☐ Surat pernyataan melaksanakan tugas
   - ☐ Daftar keluarga (KP4)
   - ☐ Fotokopi surat nikah
   - ☐ Fotokopi akte kelahiran
   - ☐ SKPP
   - ☐ Daftar potongan sewa rumah dinas
   - ☐ Surat keterangan masih sekolah/kuliah
   - ☐ Surat pindah
   - ☐ Surat kematian
   - ☐ SSP PPh Pasal 21
   - ☐ Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



- 29 -

SPP-LS - khusus pengadaan barang dan jasa

- ☐ Surat pengantar SPP-LS
- ☐ Ringkasan SPP-LS
- ☐ Rincian SPP-LS
- ☐ Salinan SPD
- ☐ Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- ☐ ESP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut
- ☐ Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank benar ketiga
- ☐ Berita acara penyelesaian pekerjaan
- ☐ Berita acara serah terima barang dan jasa
- ☐ Berita acara pembayaran
- ☐ Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
- ☐ Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
- ☐ Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
- ☐ Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
- ☐ Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja
- ☐ Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
- ☐ Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan
- ☐ Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek)
- ☐ Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan hargamya menggunakan biaya personil (billing rate, penambahan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

PENELITI KELENGKAPAAN DOKUMEN SPP(6)

Tanggal : 5 MARET 2021
Nama : SUKIMI, SE
NIP : 680 [illegible] 87 03 2008
Tanda Tangan : .....

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

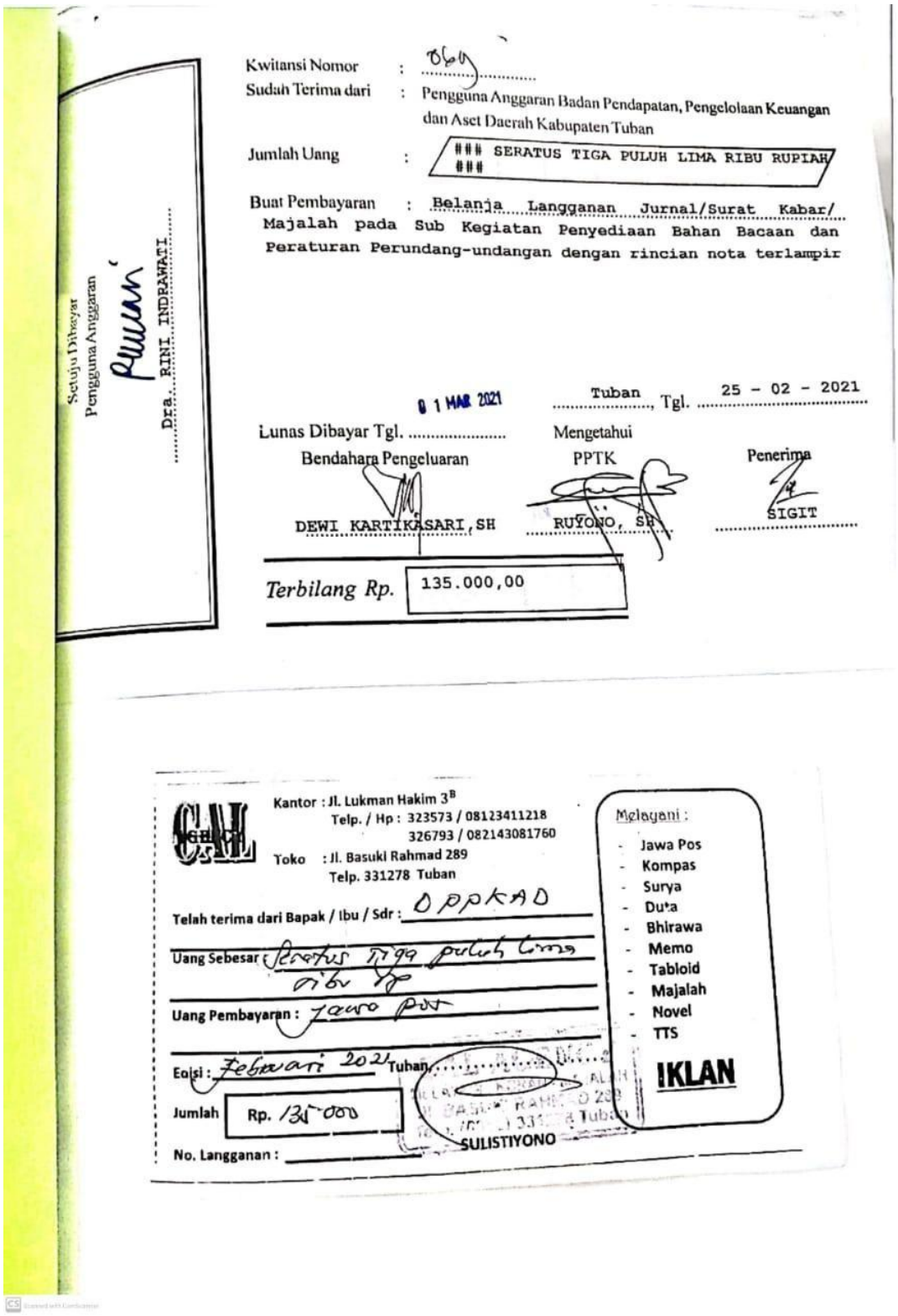
CARA PENGISIAN:

1) SKPD diisi dengan nama dan kode satuan kerja perangkat daerah.
2) Unit Kerja diisi dengan nama dan kode unit kerja perangkat daerah.
3) Alamat diisi dengan alamat satuan/unit kerja perangkat daerah.
4) No. DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan nomor pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/[illegible] yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
5) Tanggal DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan tanggal pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/[illegible] SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
6) Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran APBD.
7) Bulan diisi dengan bulan tahun anggaran APBD.
8) Urusan Pemerintahan diisi dengan nama dan kode urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD
9) Nama Program diisi dengan nama dan kode program SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
10) Nama Kegiatan diisi dengan nama dan kode kegiatan SKPD yang berkaitan dengan pengajuan SPP.
11) Huruf a Jumlah Pembayaran yang diminta kan diisi dengan jumlah Rupiah dalam angka dan huruf dalam kata-kata sesuai permintaan SPP.
12) Huruf b Untuk keperluan diisi dengan uraian keperluan pengajuan SPP.
13) Huruf c Nama Bendahara/Pihak Ketiga diisi dengan nama bendahara pengeluaran (jika pengajuan SPP-LS) dan/atau nama pihak ketiga (jika pengajuan SPP-LS).
14) Huruf d Alamat diisi dengan alamat bendahara pengeluaran atau alamat pihak ketiga.
15) Huruf e No. Rekening Bank diisi dengan nomor rekening bank bendahara pengeluaran atau pihak ketiga
16) Diisi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti.
17) ☐ - Diisi dengan cara memberi tanda check list (√) jika dokumen ada.

Sumber: BPPKAD Tuban

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 10. Contoh Kuitansi



Kwitansi Nomor : 060

Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban

Jumlah Uang : ### SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH ###

Buat Pembayaran : Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian nota terlampir

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran
Dra. RINI INDRAWATI

Tuban, Tgl. 25 - 02 - 2021

Lunas Dibayar Tgl. 01 MAR 2021

Bendahara Pengeluaran	Mengetahui PPTK	Penerima
DEWI KARTIKASARI, SH	RUYONO, SH	SIGIT

Terbilang Rp. 135.000,00

Kantor : Jl. Lukman Hakim 3B
Telp. / Hp : 323573 / 08123411218
326793 / 082143081760
Toko : Jl. Basuki Rahmad 289
Telp. 331278 Tuban

Telah terima dari Bapak / Ibu / Sdr : OPPKAD

Uang Sebesar : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Uang Pembayaran : Jawa Pos

Edisi : Februari 2021 Tuban

Jumlah Rp. 135.000

No. Langganan :

SULISTIYONO

Melayani :
- Jawa Pos
- Kompas
- Surya
- Duta
- Bhirawa
- Memo
- Tabloid
- Majalah
- Novel
- TTS

IKLAN

Sumber: BPPKAD Tuban

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 11. Daftar Pertanyaan Wawancara Tatap Muka

BAHAN WAWANCARA

1. Gambaran Umum Penerapan Transaksi Nontunai (TNT)
   a. Realisasi TNT di Kabupaten Tuban sudah berapa persen?
   b. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan belanja?
   c. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan pendapatan?
   d. Penerapan TNT di Kabupaten Tuban:
      - Sejak kapan? Apakah dari awal dikeluarkannya SE Mendagri mengenai Implementasi TNT, Kabupaten Tuban sudah siap?
      - Dilakukan secara bertahap atau langsung keseluruhan? Jika dilakukan secara bertahap, ada berapa dan apa saja komponen belanja/pendapatan pada penerapan pertama, kedua, dst.
      - Apakah dari awal penerapan TNT, semua SKPD sudah menerapkan transaksi nontunai ataukah bertahap? Jika bertahap, yang pertama menerapkan siapa saja, kedua siapa saja, dan sampai sekarang apakah semua SKPD sudah menerapkan?
   e. Regulasi: Peraturan terkait implementasi TNT apa saja?
      - Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
      - SE Kemendagri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

      Selain ketiga aturan tersebut, apakah ada peraturan lainnya?
   f. Prosedur pelaksanaan TNT di Kabupaten Tuban: apakah menggunakan *single user* atau *multi user*?

      **single user*: pengiriman kode verifikasi dari pihak bank hanya melibatkan wewenang bendahara tanpa melalui PA/KPA.

      **multi user*: melibatkan PA/KPA untuk melakukan fungsi kontrol atas transaksi melalui pengiriman kode OTP ke ponsel masing-masing

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PA/KPA.

g. Aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan pembayaran secara nontunai?

2. Implementasi Transaksi Nontunai (TNT)

a. Sosialisasi kebijakan TNT → Sosialisasi dari pusat ke BPPKAD; Sosialisasi dari BPPKAD ke SKPD
   - Sistem sosialisasinya seperti apa?
   - Kapan?
   - Pendapat narasumber mengenai sosialisasi kebijakan TNT (apakah sudah jelas? Apakah tujuan sosialisasi sudah tercapai? Apakah sosialisasi tersebut sudah mencakup ke semua pihak terkait? Apakah sosialisasi tersebut sudah tepat sasaran?)

b. Ketersediaan SDM → BPPKAD; SKPD Lainnya
   - jumlah: jumlah SDM memenuhi atau tidak?
   - Kualitas: apakah terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan pelaksanaan nontunai?

c. Ketersediaan fasilitas seperti:
   - Jaringan internet
   - Aplikasi
   - Mesin ATM

   Apakah ada kesulitan atau hambatan?

d. Apakah Kabupaten Tuban mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme secara detail mengenai TNT?

e. Apakah sudah pernah ada evaluasi dari BPPKAD terkait pelaksanaan TNT di Kabupaten Tuban?

f. Apa saja hambatan/kendala penerapan TNT di Kabupaten Tuban?

g. Apakah ada *reward and punishment* untuk memotivasi para pelaksana kebijakan TNT di Kabupaten Tuban (terutama waktu awal penerapan dulu)?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

h. Apa manfaat/keuntungan yang dirasakan oleh Pemkab Tuban setelah adanya kebijakan TNT?

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

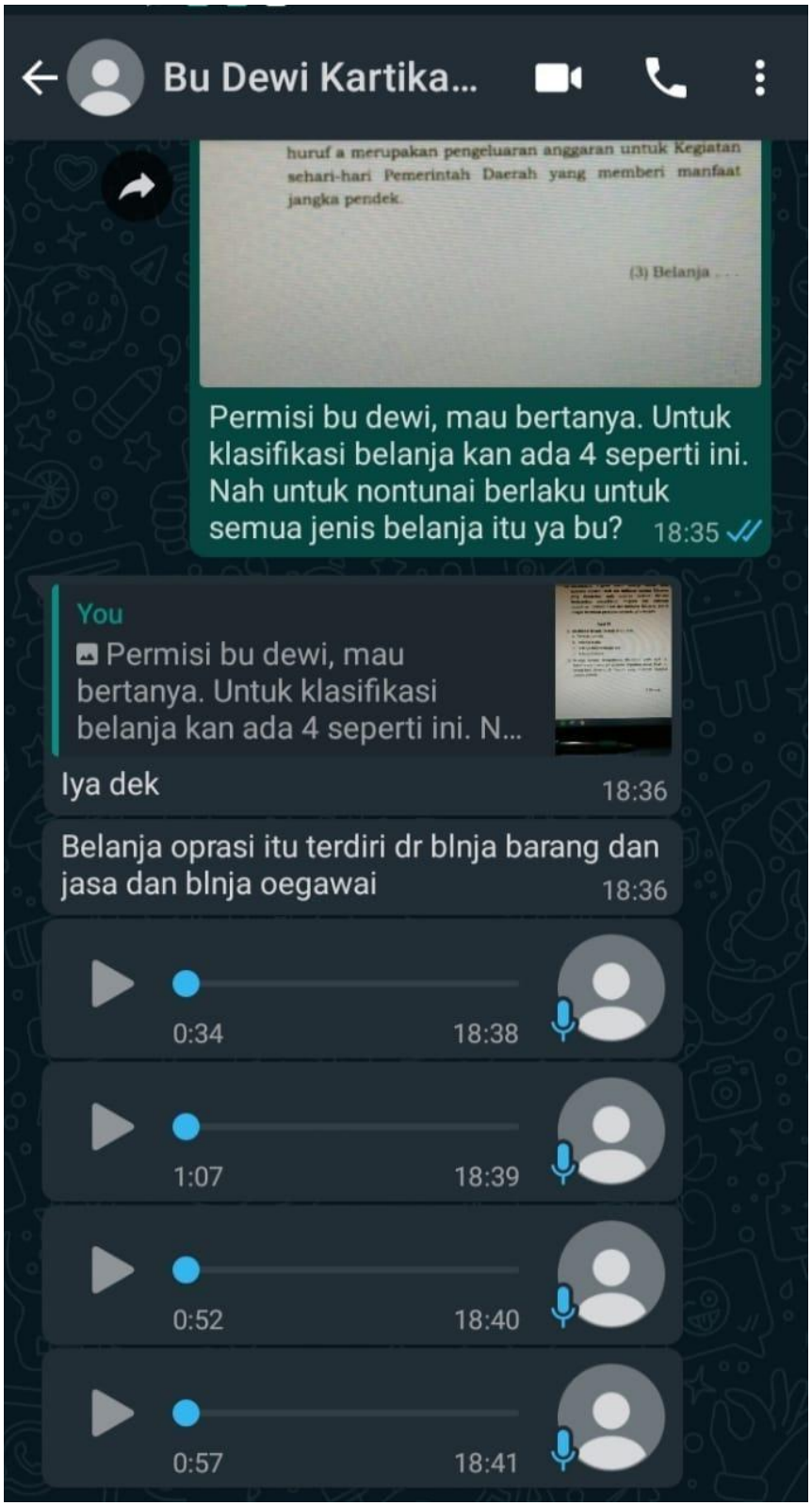
3. Prosedur Pembayaran Secara Nontunai dalam Pelaksanaan Belanja
    a. Penerapan transaksi nontunai sudah dilakukan secara penuh atau masih ada penyimpanan kas di Bendahara Pengeluaran? (Jika melihat Perbup Tuban No. 68 Tahun 2020 Pasal 19, belanja barang dan jasa dengan nilai pengeluaran belanja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dilaksanakan dengan menggunakan transaksi tunai, itu artinya pelaksanaan belanja di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya menggunakan TNT?)
    b. Penerapan TNT pada pengeluaran menggunakan jenis pembayaran apa saja (UP, GU, LS, atau lainnya)?
    c. Bagaimana proses/alur pembayaran belanja daerah menggunakan mekanisme pembayaran nontunai?
4. Perwujudan *Good Governance* (Pengeluaran)
    a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip akuntabilitas.
    b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip transparansi.
    c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas.
    d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip profesionalisme.
5. Penerapan TNT pada Penerimaan/Pendapatan
    a. Apakah penerapan TNT pada pendapatan sudah 100%?
    b. Bagaimana proses/alur penerimaan daerah menggunakan mekanisme nontunai?

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

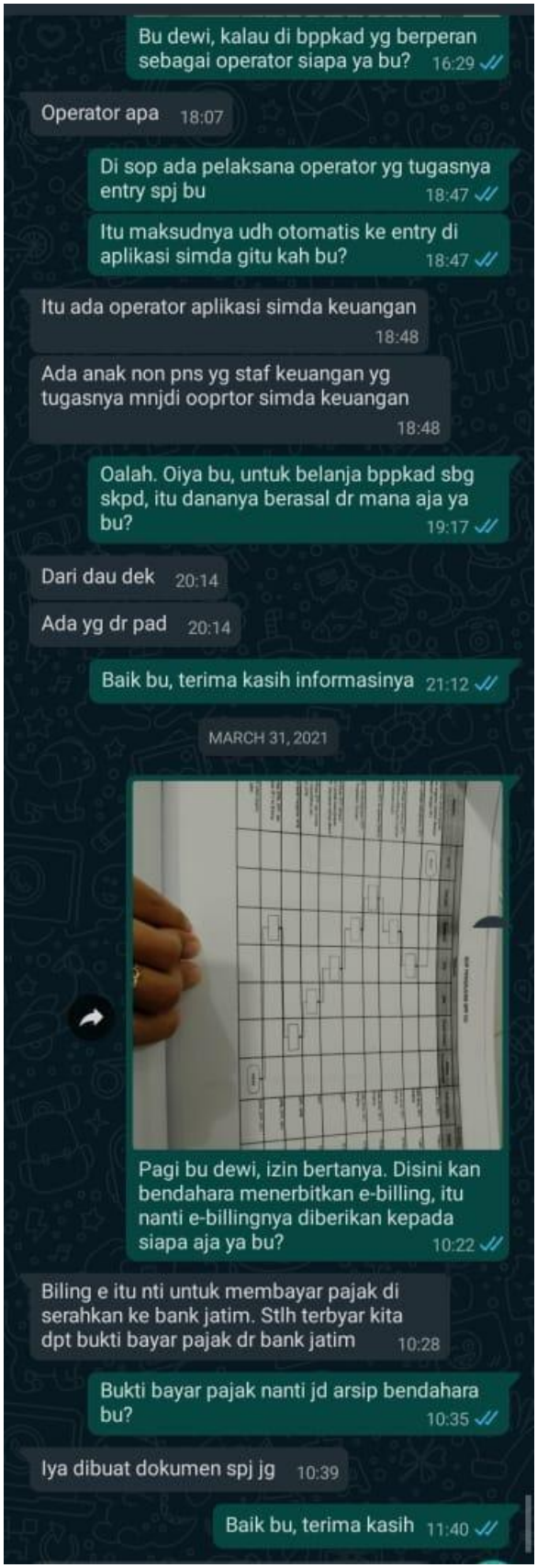
6. Perwujudan *Good Governance* (Pendapatan)
    a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip akuntabilitas.
    b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip transparansi.
    c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas.
    d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip profesionalisme.

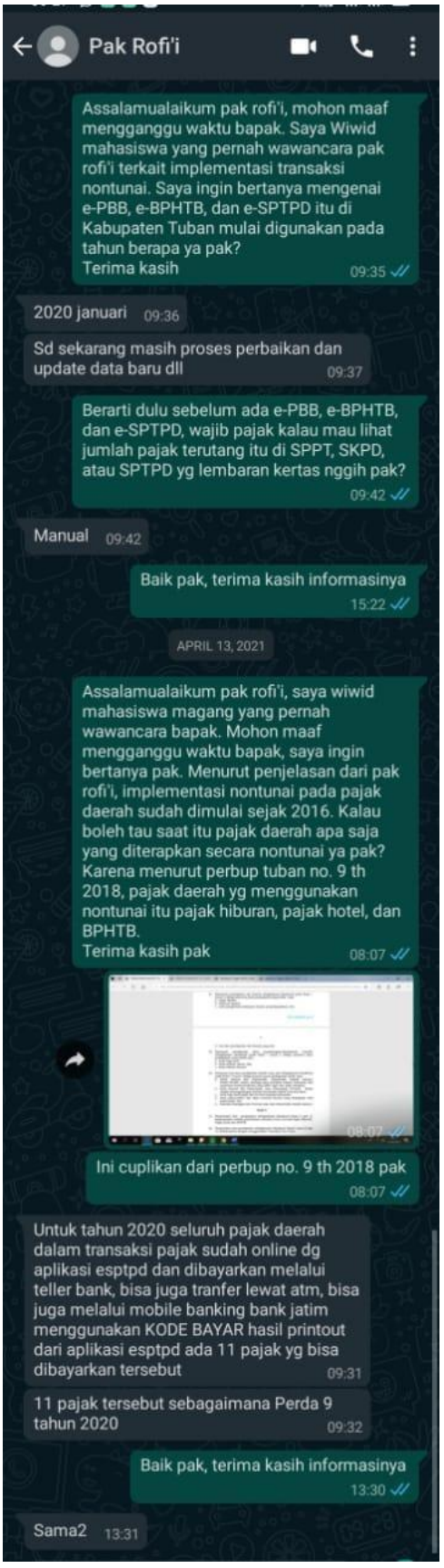
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI
KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran 12. Cuplikan Wawancara *Online* Melalui *Whatsapp Chat*

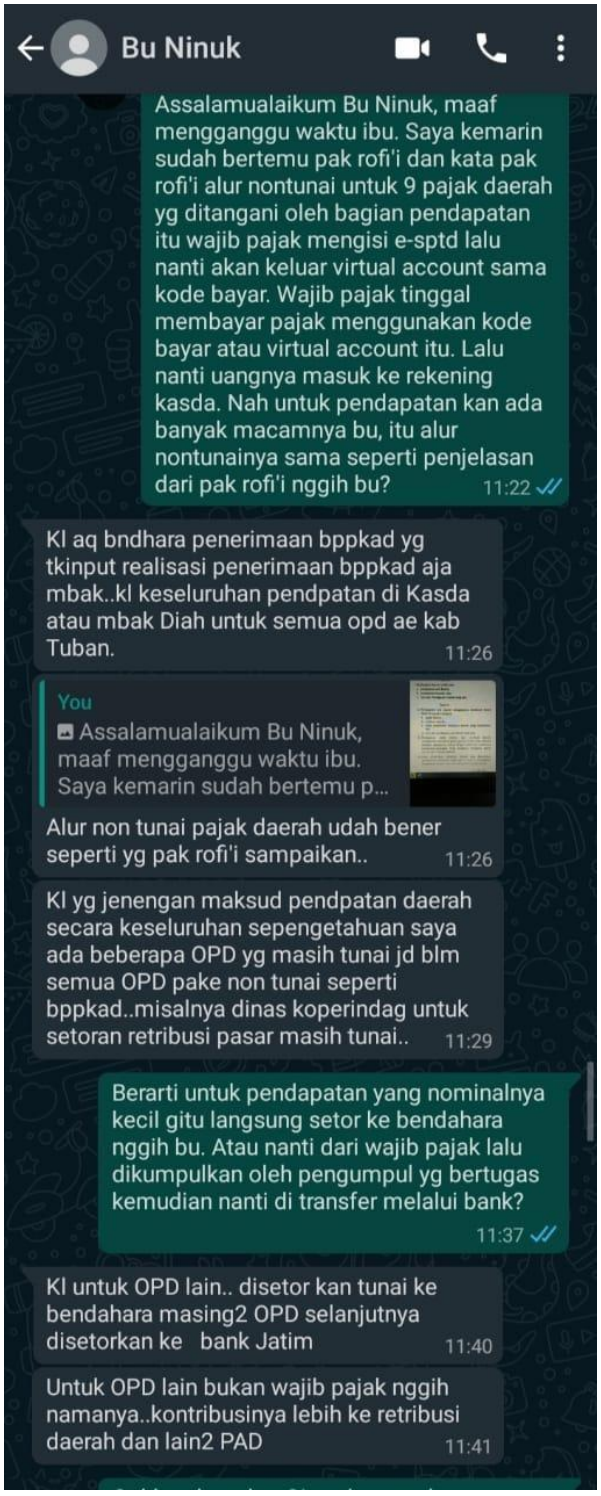


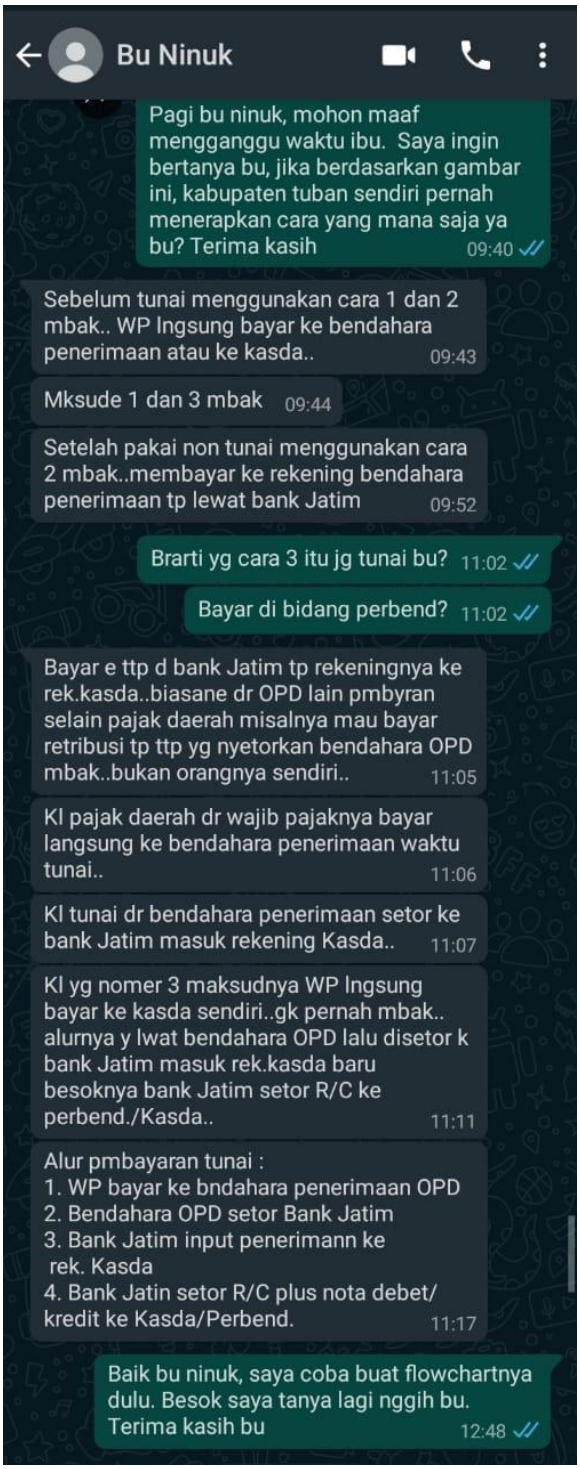
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



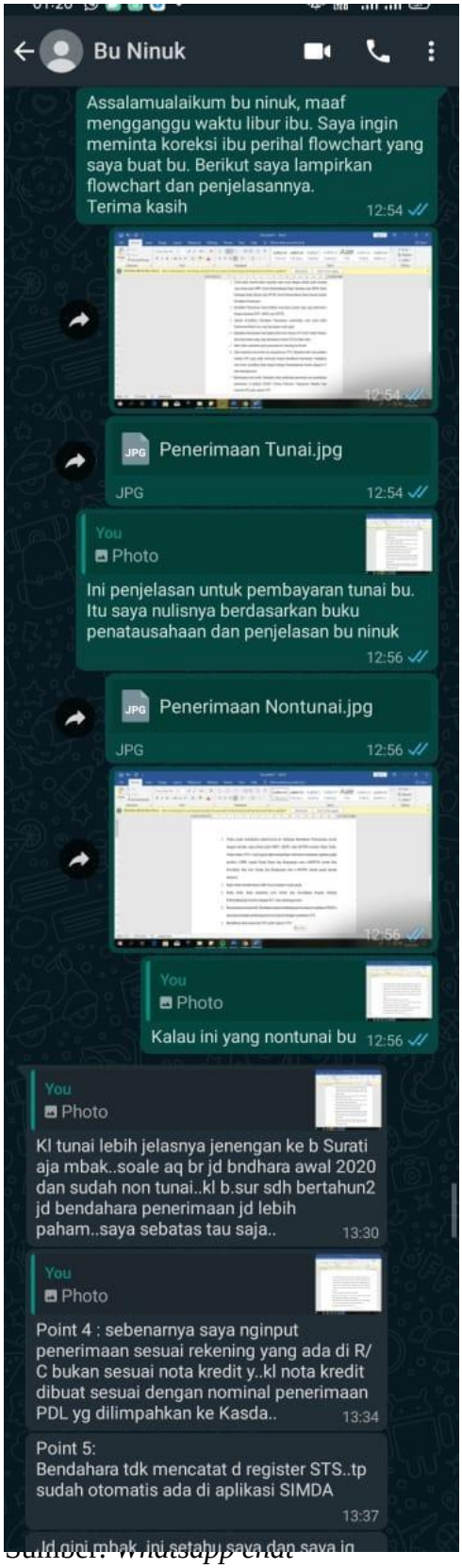


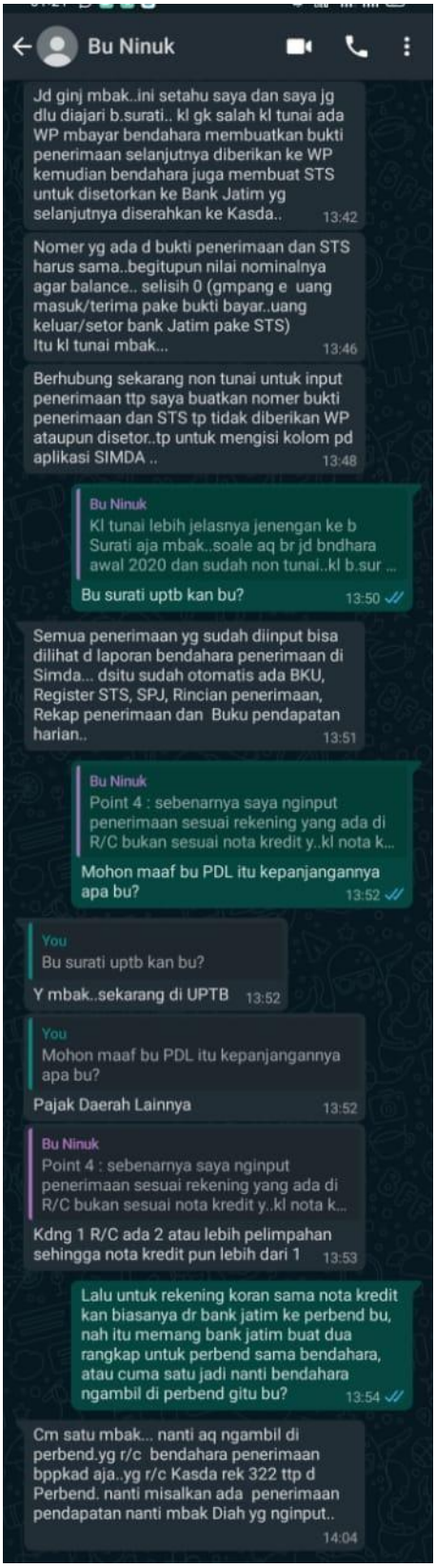
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/





UNIVERSITAS
GADJAH MADA
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN)
WIWID WIJIYO MUKTI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/





Sumber: *Whatsapp chat*